



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN**  
**DINAS TENAGA KERJA**

**LAPORAN PELAKSANAAN PENILAIAN RISIKO  
TAHUN 2026  
DINAS TENAGA KERJA  
KABUPATEN LAMONGAN**

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT sehingga penyusunan laporan pelaksanaan penilaian risiko Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan tahun 2025 telah terselesaikan dengan baik. Sebagai pelaksanaan atas ketentuan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah, dan sebagai tindak lanjut Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.

Untuk meningkatkan kualitas penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pemerintah daerah, diperlukan pengelolaan risiko pada setiap Perangkat Daerah selaku Unit Pemilik resiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan. Dokumen Pengelolaan Risiko ini menjadi acuan bagi pejabat/seluruh pegawai di lingkungan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan untuk melakukan pengelolaan risiko selama satu tahun.

Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko diterapkan dengan maksud untuk menyediakan informasi risiko bagi organisasi sehingga organisasi dapat melakukan upaya agar risiko tersebut tidak terjadi atau mengurangi dampaknya. Proses pengelolaan risiko meliputi indentifikasi kelemahan lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Penilaian risiko dimaksudkan untuk mengidentifikasi risiko yang dapat menghambat pencapaiantujuan instansi pemerintah dan merumuskan kegiatan pengendalian risiko yang diperlukan untuk memperkecil risiko. Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi personil di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2026. Sehingga tujuan dan sasaran strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan dapat tercapai sesuai dengan target yang ditentukan.

Demikian Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan Tahun 2026 ini disusun. Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi agar dapat terlaksana dengan baik.

Lamongan,           Maret 2026

KEPALA DINAS TENAGA KERJA  
KABUPATEN LAMONGAN



M. ZAMRONI, S.Sos., M.Si.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19730707 199303 1 010

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Pengertian manajemen risiko suatu proses identifikasi, analisis, penilaian, pengendalian, dan upaya menghindari, meminimalisir atau bahkan menghapus risiko yang tidak dapat diterima. Risiko berhubungan dengan pendekatan atau metodologi dalam menghadapi ketidakpastian, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) artikata risiko adalah akibat yang kurang menyenangkan dari suatu tindakan. Ketidakpastian ini berupa ancaman, pengembangan strategi dan mitigasi risiko. Manajemen risiko adalah suatu proses perencanaan, pengaturan, pemimpinan, dan pengontrolan aktivitas sebuah organisasi. Penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan atau pengelolaan sumber daya. Manajemen risiko juga dapat disebut sebagai salah satu cara untuk mengorganisir suatu risiko yang nantinya akan dihadapi baik itu sudah diketahui atau belum diketahui yang tidak terpikirkan dengan memindahkan risiko kepada pihak lain atau mengurangi efek negative dari risiko dan menampung baik sebagian atau semua konsekuensi risiko dari beberapa aktifitas manusia. Dimana proses manajemen risiko yang meliputi penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumber daya. Oleh sebab itu melalui manajemen risiko diharapkan ketidakpastian yang menimbulkan kerugian dapat diminimalisir atau bahkan dapat dihilangkan karena setiap kegiatan pasti ada risiko yang akan ditimbulkan. Maka dari pada itu setiap Instansi Pemerintah diharuskan melakukan penilaian resiko (risk assessment) dengan cara mengidentifikasi dan menganalisis resiko dalam tugas dan fungsinya.

Upaya tersebut tidaklah mudah dan perlu adanya kontribusi dari semua unsur yang ada di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan pada setiap level untuk menjalankan fungsinya masing-masing dengan baik. Disamping itu, setiap aktifitas yang dilakukan tidak terlepas dari adanya resiko yang dapat berpengaruh dalam pencapaian tujuan pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan. Oleh karena itu, upaya implementasi manajemen resiko Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan perlu dikembangkan lebih lanjut.

## **B. DASAR HUKUM**

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan;
4. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan;
5. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.

## **C. MAKSUD DAN TUJUAN**

Manajemen risiko diterapkan dengan maksud untuk menyediakan informasi risiko bagi organisasi sehingga organisasi dapat melakukan upaya agar risiko tersebut tidak terjadi atau mengurangi dampaknya. Penerapan manajemen risiko khususnya pada Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II serta Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan IV bertujuan untuk :

- a. Mengelola risiko dalam mencapai sasaran strategis organisasi pemerintah;
- b. Meningkatkan kemungkinan pencapaian sasaran strategis organisasi dan peningkatan kinerja;
- c. Mendorong manajemen yang proaktif dan antisipatif;
- d. Memberikan dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan dan perencanaan;
- e. Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi;
- f. Meningkatkan ketahanan organisasi;
- g. Meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi serta meningkatkan kepercayaan para pemangku

kepentingan.

#### **D. RUANG LINGKUP**

Manajemen risiko pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan dilakukan dengan ruang lingkup dokumen, sumber daya manusia, dan lingkungan yang meliputi :

- Penentuan konteks kegiatan yang akan dikelola risikonya;
- Identifikasi risiko;
- Analisis risiko;
- Evaluasi risiko;
- Pengendalian risiko;
- Pemantauan dan telaah ulang;
- Koordinasi dan komunikasi.

## **II. PERBAIKAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN YANG DIHARAPKAN**

### **A. KONDISI LINGKUNGAN PENGENDALIAN SAAT INI**

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan telah menyusun kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang mungkin dapat terjadi sesuai dengan yang telah direncanakan setiap tahunnya. Kegiatan pengendalian dilakukukan untuk mengatasi resiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa Tindakan mengatasi resiko telah dilakukan secara efektif.

Untuk dapat melihat nilai efektifitas dari pengendalian resiko yang telah direncanakan, maka dilakukan penilaian survei persepsi kepada seluruh pegawai mulai dari staf hingga pejabat eselon mengenai hasil penilaian pengendalian resiko pada unit kerja urusan keuangan.

Hasil penilaian yang telah dilakukan yakni dalam penegakan integritas dan nilai etika, komitmen terhadap kompetensi , kepemimpinan yang kondusif, pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan, pendelegasian wewenang dan tanggung jawab, penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat mengenai pembinaan sumber daya manusia, perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif, serta hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait telah memiliki hasil penilaian yang baik dan memadai baik dari hasil review dokumen maupun hasil survei persepsi.

### **B. RENCANA PERBAIKAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN**

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan melaksanakan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko pada tiap tribulan. Pemantauan pengendalian resiko pada dasarnya adalah untuk memastikan apakah sistem pengendalian resiko yang ada telah berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Strategi yang dilakukan guna meningkatkan nilai hasil survei persepsi terkait komitmen terhadap kompetensi yakni dengan peningkatan kompetensi pegawai baik terkait pengelolaan dasar keuangan maupun pengelolaan resiko secara terintegrasi dan berkala. Hal ini diharapkan guna memperbaiki lingkungan pengendalian yang mendukung penciptaan budaya pengelolaan resiko yang baik di unit kerja masing-masing pegawai.

### III. PENILAIAN RESIKO DAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN

#### A. PENETAPAN KONTEKS / TUJUAN

Dalam penetapan tujuan perangkat daerah, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan telah memperhatikan dan mengacu pada RPJMD. Adapun Sasaran RPJMD yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah yakni **“Meningkatnya Kesempatan Kerja Masyarakat”** dengan indikator **Prosentase Tingkat Pengangguran Terbuka**. Sehingga untuk mendukung sasaran pembangunan daerah, ditetapkan Tujuan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan Kabupaten Lamongan yaitu **“Meningkatnya Kesempatan Kerja Masyarakat”**.

Setelah menetapkan tujuan maka perlu untuk menetapkan Sasaran. Agar bisa mendapatkan hasil nyata dan terukur dalam waktu tahunan maka sasaran dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan yang ditetapkan adalah **“Meningkatnya Perluasan Kesempatan Kerja serta Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah”**.

#### B. HASIL IDENTIFIKASI RESIKO

Penilaian resiko adalah kegiatan penilaian terhadap kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Kegiatan penilaian resiko dilaksanakan melalui aktivitas identifikasi resiko dengan menggunakan metodologi dan mekanisme yang memadai untuk mengenali resiko organisasi perangkat daerah.

Dalam pelaksanaan proses identifikasi resiko, perlu memperhatikan beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya peristiwa suatu resiko. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan telah menyusun hasil identifikasi resiko baik resiko strategis maupun resiko operasional, uraian identifikasi resiko sebagai berikut:

Tabel III.1 Identifikasi Risiko Strategis OPD

| Sasaran Strategis                                                     | Indikator Kinerja Sasaran        | Risiko                                |                                                                                       |                  |                           | Sebab                                                                                    |           | C/ U C | Dampak                                                                             |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|                                                                       |                                  | Uraian                                | Skenario Risiko (siapa (who) melakukan apa (what))                                    | Kode Risiko      | Pemilik                   | Uraian                                                                                   | Sumber    |        | Uraian                                                                             | Pihak yang Terkena                |
| <b>Risiko Strategis OPD Dinas Tenaga Kerja</b>                        |                                  |                                       |                                                                                       |                  |                           |                                                                                          |           |        |                                                                                    |                                   |
| Meningkatnya Perluasan Kesempatan Kerja                               | Presentase Penduduk yang Bekerja | Terbatas nya kesempatan kerja         | Angkatan Kerja Baru tidak memiliki sertifikasi kompetensi yang sesuai kebutuhan pasar | RSO.26.07.115.01 | Kepala Dinas Tenaga Kerja | Ketidak sesuaian kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri | Eksternal | C      | Pengangguran meningkat                                                             | DISNAKER dan Angkatan Kerja       |
| Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Akuntabilitas Pelayanan Publik | Nilai SAKIP                      | Akuntabilitas kinerja internal rendah |                                                                                       | RSO.26.07.115.02 | Kepala Dinas Tenaga Kerja | Implementasi evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum optimal                       | Internal  | C      | Kurang efektif dan efisiennya penggunaan anggaran dalam mencapai tujuan organisasi | DISNAKER dan Pemerintah Kabupaten |
| Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Akuntabilitas Pelayanan Publik | Nilai IKM                        | Kualitas pelayanan kurang optimal     |                                                                                       | RSO.26.07.115.03 | Kepala Dinas Tenaga Kerja | Implementasi pelayanan belum sesuai dengan harapan masyarakat                            | Internal  | C      | Tingkat kepuasan masyarakat rendah                                                 | DISNAKER dan Pemerintah Kabupaten |

| Sasaran Strategis                                                     | Indikator Kinerja Sasaran | Risiko                         |                                                    |                          |                           | Sebab                                    |          | C/<br>U<br>C | Dampak          |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------------------------|----------|--------------|-----------------|-----------------------------------|
|                                                                       |                           | Uraian                         | Skenario Risiko (siapa (who) melakukan apa (what)) | Kode Risiko              | Pemilik                   | Uraian                                   | Sumber   |              | Uraian          | Pihak yang Terkena                |
| Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Akuntabilitas Pelayanan Publik | Nilai Manajemen Risiko    | Target kegiatan tidak tercapai |                                                    | RSO.26<br>.07.115.<br>04 | Kepala Dinas Tenaga Kerja | Penyusunan Register risiko kurang sesuai | Internal | C            | Nilai MR rendah | DISNAKER dan Pemerintah Kabupaten |

Tabel III.2 Identifikasi Risiko Operasional OPD

| Kegiatan/Subkegiatan                                                                                                    | Indikator Keluaran                                                           | Tahap Pelaksanaan Kegiatan      | Risiko                                                               |                                                    |                           |                               | Sebab                                                                     |                      | C/UC | Dampak                                                              |                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                                                         |                                                                              |                                 | Uraian                                                               | Skenario Risiko (siapa (who) melakukan apa (what)) | Kode                      | Pemilik                       | Uraian                                                                    | Sumber               |      | Uraian                                                              | Pihak yang Terkena                 |
| <b>Risiko operasional OPD Dinas Tenaga Kerja</b>                                                                        |                                                                              |                                 |                                                                      |                                                    |                           |                               |                                                                           |                      |      |                                                                     |                                    |
| Subkegiatan: Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro                                                           | Jumlah SDM perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro                          | Persiapan Pelatihan/ Fasilitasi | Operasional: Belum semua SDM perusahaan mampu menyusun RTK Mikro     |                                                    | ROO .26.0<br>7.11<br>5.01 | Kabid Penempatan Tenaga Kerja | Kurangnya tenaga instruktur/ahli di Disnaker untuk melatih SDM perusahaan | Internal             | C    | Data mikro perusahaan tidak tersedia                                | Perusahaan & Dinas                 |
| Subkegiatan: Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi | Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n | Pelaksanaan                     | Risiko Operasional: Belum Semua Lulusan BLK Bersertifikat Kompetensi |                                                    | ROO .26.0<br>7.11<br>5.02 | Kabid Pelatihan Kerja         | Terbatasnya Anggaran Pelaksanaan Uji Kompetensi                           | Internal & Eksternal | C    | Lulusan BLK tidak semua di terima di dunia usaha dan dunia industri | Pencari Kerja & Dinas Tenaga Kerja |

| Kegiatan/Subkegiatan                                     | Indikator Keluaran                                       | Tahap Pelaksanaan Kegiatan | Risiko                                                                                       |                                                                 |                              |                                                           | Sebab                                                                                                                  |                      | C/UC | Dampak                                                                          |                               |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                          |                                                          |                            | Uraian                                                                                       | Skenario Risiko (siapa (who) melakukan apa (what))              | Kode                         | Pemilik                                                   | Uraian                                                                                                                 | Sumber               |      | Uraian                                                                          | Pihak yang Terkena            |
| Kegiatan: Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta       | Jumlah lembaga pelatihan kerja swasta yang terakreditasi | Pelaksanaan                | Kemitraan: Tidak semua lembaga pelatihan kerja mengikuti akreditasi                          |                                                                 | ROO<br>.26.0<br>7.11<br>5.03 | Kabid Pelatihan Kerja                                     | Proses akreditasi membutuhkan banyak biaya                                                                             | Internal & Eksternal | C    | Lembaga yang terakreditasi sedikit dan Kualitas pelatihan swasta tidak terjamin | Peserta Kursus, LPK, DISNAKER |
| Kegiatan: Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil | Jumlah produktivitas SDM perusahaan yang meningkat       |                            | Operasional: Rendahnya peningkatan produktivitas SDM pada perusahaan kecil pasca konsultasi. | Perusahaan kecil tidak menerapkan rekomendasi pasca-konsultasi. | ROO<br>.26.0<br>7.11<br>5.04 | Kabid Informasi Pasar Kerja dan Peningkatan Produktivitas | Kurangnya komitmen pelaku usaha dalam mengimplementasikan alat, teknik, dan metode produktivitas yang telah disarankan | Eksternal            | C    | Target jumlah perusahaan yang meningkatkan produktivitasnya tidak tercapai;     | Perusahaan                    |

| Kegiatan/Subkegiatan                                                          | Indikator Keluaran                                                             | Tahap Pelaksanaan Kegiatan | Risiko                                                                                         |                                                    |                              |                                                              | Sebab                                                                                                       |                      | C/UC | Dampak                                                        |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                                               |                                                                                |                            | Uraian                                                                                         | Skenario Risiko (siapa (who) melakukan apa (what)) | Kode                         | Pemilik                                                      | Uraian                                                                                                      | Sumber               |      | Uraian                                                        | Pihak yang Terkena            |
| Subkegiatan: Job Fair/Bursa Kerja                                             | Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair / Bursa Kerja | Pelaksanaan                | Operasional: Rendahnya penyerapan tenaga kerja (lulusan SMK) pasca pelaksanaan Job Fair di BKK |                                                    | ROO<br>.26.0<br>7.11<br>5.05 | Kabid Informasi Pasar Kerja dan Peningkatan Produktivitas    | Kurangnya validasi antara kualifikasi lulusan dengan spesifikasi lowongan yang dibuka oleh perusahaan mitra | Internal & Eksternal | C    | Meningkatnya angka pengangguran lulusan baru (fresh graduate) | lulusan baru (fresh graduate) |
| Kegiatan: Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah CPMI dan PMI Purna yang dilindungi                                      | Pelaksanaan                | Kemitraan: Banyaknya Pekerja Migran Indonesia (PMI) Ilegal                                     |                                                    | ROO<br>.26.0<br>7.11<br>5.06 | Kabid Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Minimnya sosialisasi terkait prosedur keberangkatan kepada Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)             | Internal - Eksternal | C    | PMI Ilegal meningkat                                          | PMI & Pemerintah              |

| Kegiatan/Subkegiatan                                                                                                                                               | Indikator Keluaran                                                                                                                       | Tahap Pelaksanaan Kegiatan | Risiko                                           |                                                                              |                     |                                                           | Sebab                                                                                       |                     | C/UC | Dampak                                                                                      |                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          |                            | Uraian                                           | Skenario Risiko (siapa (who) melakukan apa (what))                           | Kode                | Pemilik                                                   | Uraian                                                                                      | Sumber              |      | Uraian                                                                                      | Pihak yang Terkena                  |
| Subkegiatan: Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota | Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online | Pelaksanaan                | Risiko Kemitraan: Rendahnya Kepatuhan Perusahaan | Rendahnya kepatuhan perusahaan dalam membuat peraturan dan syarat kerja      | ROO .26.0 7.11 5.07 | Kabid Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja | Kurangnya pemahaman manajemen perusahaan terhadap regulasi terbaru dan kurangnya pengawasan | Eksternal           | C    | Munculnya perselisihan hubungan industrial dan hilangnya perlindungan hak-hak dasar pekerja | Pekerja/Buruh dan Pemerintah Daerah |
| Subkegiatan: Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja                                                              | Terlaksananya Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja                                   | Pelaksanaan                | Risiko Kemitraan : Pembayaran BPJS terlambat     | Terhambatnya hak jaminan sosial bagi tenaga kerja akibat keterlambatan iuran | ROO .26.0 7.11 5.08 | Kabid Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja | Kendala administrasi dalam pencairan dana DBHCHT                                            | Internal/ Eksternal | C    | Petani dan nelayan tidak terlindungi                                                        | Peserta BPJS                        |

| Kegiatan/Subkegiatan                                                                                       | Indikator Keluaran                                                                      | Tahap Pelaksanaan Kegiatan | Risiko                                                                                |                                                                                                               |                              |                                                              | Sebab                                                                                                                                   |                        | C/UC | Dampak                                                                                                |                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|                                                                                                            |                                                                                         |                            | Uraian                                                                                | Skenario Risiko (siapa (who) melakukan apa (what))                                                            | Kode                         | Pemilik                                                      | Uraian                                                                                                                                  | Sumber                 |      | Uraian                                                                                                | Pihak yang Terkena                              |
| Kegiatan :<br>Penataan<br>Persebaran<br>Penduduk Yang<br>Berasal Dari 1<br>(Satu) Daerah<br>Kabupaten/Kota | Jumlah calon transmigran yang ditempatkan                                               | Pelaksanaan                | Kemitraan :<br>Kuota pemberangkatan calon transmigrasi terbatas                       | Minat transmigrasi tinggi namun kuota dipangkas namun kuota dari pusat sangat minim                           | ROO<br>.26.0<br>7.11<br>5.09 | Kabid Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Anggaran pusat terbatas                                                                                                                 | Eksternal              | C    | Penundaan pemberangkatan calon transmigrasi                                                           | Calon Transmigran                               |
| Kegiatan<br>Perencanaan,<br>Penganggaran,<br>dan Evaluasi<br>Kinerja Perangkat Daerah                      | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Yang Disusun Tepat Waktu | Perencanaan                | Risiko Fraud : Pelaporan hasil evaluasi kinerja tidak tepat waktu dan kurang maksimal | Oknum membuat Laporan secara formalitas/asal-asalan di akhir tenggat waktu demi mengejar target administratif | ROO<br>.26.0<br>7.11<br>5.10 | Kasubag. Perencanaan dan Evaluasi                            | Kurangnya pemahaman antar Pihak bidang terhadap perencanaan, penganggaran serta monev pelaksanaan kinerja dan anggaran program/kegiatan | Internal dan Eksternal |      | Keterlambatan pengambilan kebijakan strategis oleh pimpinan, menghambat penyusunan LKPJ Kepala Daerah | Perangkat Daerah, Pemerintah Daerah, Masyarakat |

| Kegiatan/Subkegiatan                                                      | Indikator Keluaran                                                       | Tahap Pelaksanaan Kegiatan | Risiko                                                                                                               |                                                                        |                     |                               | Sebab                                                                                            |                        | C/UC | Dampak                                                                                      |                          |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                                           |                                                                          |                            | Uraian                                                                                                               | Skenario Risiko (siapa (who) melakukan apa (what))                     | Kode                | Pemilik                       | Uraian                                                                                           | Sumber                 |      | Uraian                                                                                      | Pihak yang Terkena       |
| Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                          | Jumlah Laporan Keuangan Yang Disusun Tepat Waktu                         | Pelaksanaan                | Operasional: Petugas Akuntansi/Bendahara menyampaikan laporan yang tidak akurat atau melewati batas waktu (deadline) |                                                                        | ROO .26.0 7.11 5.11 | Kasubbag Keuangan             | Sistem informasi akuntansi (SIPD/SIMDA) mengalami kendala teknis atau downtime di akhir periode. | Internal dan Eksternal | C    | Keterlambatan proses pencairan anggaran tahap berikutnya dan ketidaksinkronan data keuangan | Seluruh Unit Kerja Dinas |
| Subkegiatan: Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Pelaksanaan                | Fraud: Pengaturan pemenang dengan vendor tertentu                                                                    | Spesifikasi dalam dokumen lelang diarahkan pada satu penyedia tertentu | ROO .26.0 7.11 5.12 | Kasubbag Umum dan Kepegawaian | Intervensi pihak luar atau keinginan untuk memenangkan rekanan lama                              | Internal dan Eksternal | C    | Proses tidak transparan                                                                     | Dinas Tenaga Kerja       |

### C. HASIL ANALISIS RESIKO

Analisis risiko adalah proses penilaian terhadap risiko yang telah teridentifikasi, dalam rangka mengestimasi kemungkinan munculnya dan besaran dampaknya, untuk menetapkan level atau status risikonya. Analisis risiko dibutuhkan guna mengestimasi besaran kemungkinan munculnya peristiwa risiko dan dampak yang ditimbulkan. Serta menetapkan skala dan status risiko sebagai kombinasi hubungan antara kemungkinan dan dampak risiko.

Pengukuran dimensi kemungkinan kejadian risiko dan konsekuensi atau dampak risiko menggunakan 5 (lima) tingkatan, sebagai berikut:

**Tabel III.3 Kriteria Kemungkinan Risiko**

| <b>Kriteria Risiko</b>      |               |
|-----------------------------|---------------|
| <b>Kriteria Kemungkinan</b> |               |
| Nilai Kemungkinan           | Keterangan    |
| 1                           | Sangat Jarang |
| 2                           | Jarang        |
| 3                           | Kadang-Kadang |
| 4                           | Sering        |
| 5                           | Sangat Sering |

**Tabel III.4 Kriteria Konsekuensi / Dampak Risiko**

| <b>Kriteria Risiko</b>        |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| <b>Kriteria Dampak Risiko</b> |                   |
| Nilai Dampak                  | Keterangan        |
| 1                             | Tidak Signifikan  |
| 2                             | Kurang Signifikan |
| 3                             | Sedang            |
| 4                             | Signifikan        |
| 5                             | Sangat Signifikan |

Setelah mengetahui tingkatan skala atau level dari kemungkinan dan dampak resiko. Maka perlu juga mengetahui tingkatan resiko, tingkatan resiko adalah hasil perkalian nilai bahaya dengan nilai potensi terjadinya bahaya. Pengukuran tingkatan resiko diperlukan guna mengetahui dan menetapkan status resiko yang akan di uraikan. Perhitungan nilai tingkatan resiko sebagai berikut :

**Tabel III.5 Tingkatan Resiko**

| Skala | Kemungkinan   | Konsekuensi/Dampak |                   |        |            |                   |
|-------|---------------|--------------------|-------------------|--------|------------|-------------------|
|       |               | Tidak Signifikan   | Kurang Signifikan | Sedang | Signifikan | Sangat Signifikan |
| 5     | Sangat Sering | 5                  | 10                | 15     | 20         | 25                |
| 4     | Sering        | 4                  | 8                 | 12     | 16         | 20                |
| 3     | Kadang-kadang | 3                  | 6                 | 9      | 12         | 15                |
| 2     | Jarang        | 2                  | 4                 | 6      | 8          | 10                |
| 1     | Sangat jarang | 1                  | 2                 | 3      | 4          | 5                 |

**Keterangan :**

Nilai  $\leq 4$  = Hijau

Nilai 9 – 14 = Oranye

Nilai 5 – 8 = Kuning

Nilai 15 – 25 = Merah

Status Risiko adalah suatu daftar yang memuat informasi tentang referensi nilai kemungkinan dan referensi nilai dampaknya, serta tingkat dan penjelasannya sesuai dengan urutan mulai dari resiko dengan tingkat terbesar sampai dengan tingkat terkecil. Peringkat status risiko ditentukan berdasarkan tingkat dampak risiko dan kemungkinan kejadian risiko, uraian status resiko sebagai berikut:

**Tabel III.6 Status Resiko**

| Skala | Kemungkinan   | Konsekuensi/Dampak |                   |               |               |                   |
|-------|---------------|--------------------|-------------------|---------------|---------------|-------------------|
|       |               | Tidak Signifikan   | Kurang Signifikan | Sedang        | Signifikan    | Sangat Signifikan |
| 5     | Sangat Sering | Sedang             | Tinggi            | Sangat Tinggi | Sangat Tinggi | Sangat Tinggi     |
| 4     | Sering        | Sedang             | Sedang            | Tinggi        | Sangat tinggi | Sangat tinggi     |
| 3     | Kadang-kadang | Rendah             | Sedang            | Tinggi        | Tinggi        | Sangat            |
| 2     | Jarang        | Rendah             | Rendah            | Sedang        | Sedang        | Tinggi            |
| 1     | Sangat jarang | Rendah             | Rendah            | Rendah        | Sedang        | Sedang            |

**Keterangan :**

Hijau = Rendah

Oranye

= Tinggi

Kuning = Sedang

Merah

= Sangat Tinggi

Dari tabel penilaian analisis tersebut Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan telah menyusun analisis resiko berdasarkan penilaian hasil dari survei responden pada masing-masing pegawai, mulai dari staf – eselon sesuai urutan kategori baik analisis resiko strategis maupun resiko operasional, sebagai berikut :

| No                          | Entitas            | Risiko Prioritas                                                | Kode Risiko      | Skala Risiko | Pemilik Risiko            | Penyebab                                                                                 | Dampak                                                                             |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Risiko Strategis OPD</b> |                    |                                                                 |                  |              |                           |                                                                                          |                                                                                    |
| 1                           | Dinas Tenaga Kerja | Terbatas nya kesempatan kerja                                   | RSO.26.07.115.01 | 9            | Kepala Dinas Tenaga Kerja | Ketidak sesuaian kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri | Pengangguran meningkat                                                             |
| 2                           | Dinas Tenaga Kerja | Akuntabilitas kinerja internal rendah                           | RSO.26.07.115.02 | 9            | Kepala Dinas Tenaga Kerja | Implementasi evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum optimal                       | Kurang efektif dan efisiennya penggunaan anggaran dalam mencapai tujuan organisasi |
| 3                           | Dinas Tenaga Kerja | Kualitas pelayanan kurang optimal                               | RSO.26.07.115.03 | 9            | Kepala Dinas Tenaga Kerja | Implementasi pelayanan belum sesuai dengan harapan masyarakat                            | Tingkat kepuasan masyarakat rendah                                                 |
| 4                           | Dinas Tenaga Kerja | Tidak tercapainya target Nilai Manajemen Risiko yang ditetapkan | RSO.26.07.115.04 | 9            | Kepala Dinas Tenaga Kerja | Penyusunan Register risiko kurang sesuai                                                 | Nilai MR rendah                                                                    |

**Gambar 1 Lampiran Form 4 Kertas Kerja Analisis Resiko Strategis Simario**

| Risiko Operasional OPD |                    |                                                                                                                             |                  |    |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                      | Dinas Tenaga Kerja | Risiko Operasional: Belum semua SDM perusahaan mampu menyusun RTK Mikro                                                     | ROO.26.07.115.01 | 10 | Kabid Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Kurangnya tenaga instruktur/ahli di Disnaker untuk melatih SDM perusahaan<br>Data mikro perusahaan tidak tersedia                                                                                                                                |
| 2                      | Dinas Tenaga Kerja | Risiko Operasional: Belum Semua Lulusan BLK Bersertifikat Kompetensi                                                        | ROO.26.07.115.02 | 9  | Kabid Pelatihan Kerja                                        | Terbatasnya Anggaran Pelaksanaan Uji Kompetensi<br>Lulusan BLK tidak semua di terima di dunia usaha dan dunia industri                                                                                                                           |
| 3                      | Dinas Tenaga Kerja | Risiko Kemitraan: Tidak semua lembaga pelatihan kerja mengikuti akreditasi                                                  | ROO.26.07.115.03 | 10 | Kabid Pelatihan Kerja                                        | Proses akreditasi membutuhkan banyak biaya<br>Lembaga yang terakreditasi sedikit dan Kualitas pelatihan swasta tidak terjamin                                                                                                                    |
| 4                      | Dinas Tenaga Kerja | Risiko Operasional: Rendahnya peningkatan produktivitas SDM pada perusahaan kecil pasca konsultasi                          | ROO.26.07.115.04 | 9  | Kabid Informasi Pasar Kerja dan Peningkatan Produktivitas    | Kurangnya komitmen pelaku usaha dalam mengimplementasikan alat, teknik, dan metode produktivitas yang telah disarankan<br>Target jumlah perusahaan yang meningkat produktivitasnya tidak tercapai                                                |
| 5                      | Dinas Tenaga Kerja | Risiko Operasional: Rendahnya penyerapan tenaga kerja (lulusan SMK) pasca pelaksanaan Job Fair di BKK                       | ROO.26.07.115.05 | 9  | Kabid Informasi Pasar Kerja dan Peningkatan Produktivitas    | Kurangnya validasi antara kualifikasi lulusan dengan spesifikasi lowongan yang dibuka oleh perusahaan mitra<br>Meningkatnya angka pengangguran lulusan baru (fresh graduate)                                                                     |
| 6                      | Dinas Tenaga Kerja | Risiko Kemitraan: Banyaknya Pekerja Migran Indonesia (PMI) Ilegal                                                           | ROO.26.07.115.06 | 9  | Kabid Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Minimnya sosialisasi terkait prosedur keberangkatan kepada Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)<br>PMI Ilegal meningkat                                                                                                                          |
| 7                      | Dinas Tenaga Kerja | Risiko Kemitraan: Rendahnya Kepatuhan Perusahaan                                                                            | ROO.26.07.115.07 | 10 | Kabid Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja    | Kurangnya pemahaman manajemen perusahaan terhadap regulasi terbaru dan kurangnya pengawasan<br>Munculnya perselisihan hubungan industrial dan hilangnya perlindungan hak-hak dasar pekerja                                                       |
| 8                      | Dinas Tenaga Kerja | Risiko Kemitraan : Pembayaran BPJS terlambat                                                                                | ROO.26.07.115.08 | 9  | Kabid Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja    | Kendala administrasi dalam pencairan dana DBHCHT<br>Petani dan nelayan tidak terlindungi                                                                                                                                                         |
| 9                      | Dinas Tenaga Kerja | Risiko Kemitraan : Kuota pemberangkatan calon transmigrasi terbatas                                                         | ROO.26.07.115.09 | 9  | Kabid Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Anggaran pusat terbatas<br>Penundaan pemberangkatan calon transmigrasi                                                                                                                                                                           |
| 10                     | Dinas Tenaga Kerja | Risiko Operasional: Pelaporan hasil evaluasi kinerja tidak tepat waktu dan kurang maksimal                                  | ROO.26.07.115.10 | 9  | Kasubag. Perencanaan dan Evaluasi                            | Kurangnya pemahaman antar Pihak bidang terhadap perencanaan, penganggaran serta monev pelaksanaan kinerja dan anggaran program/kegiatan<br>Keterlambatan pengambilan kebijakan strategis oleh pimpinan, menghambat penyusunan LKPJ Kepala Daerah |
| 11                     | Dinas Tenaga Kerja | Risiko Operasional: Petugas Akuntansi/Bendahara menyampaikan laporan yang tidak akurat atau melewati batas waktu (deadline) | ROO.26.07.115.11 | 10 | Kasubag. Keuangan                                            | Sistem informasi akuntansi (SIPD/SIMDA) mengalami kendala teknis atau downtime di akhir periode<br>Keterlambatan proses pencairan anggaran tahap berikutnya dan ketidaksinkronan data keuangan                                                   |
| 12                     | Dinas Tenaga Kerja | Risiko Fraud: Pengaturan pemenang dengan vendor tertentu                                                                    | ROO.26.07.115.12 | 9  | Kasubag Umum dan Kepegawaian                                 | Intervensi pihak luar atau keinginan untuk memenangkan rekanan lama<br>Proses tidak transparan                                                                                                                                                   |

**Gambar 2 Lampiran Form 4 Kertas Kerja Analisis Risiko Operasional Simario**

Dari kedua gambar hasil analisis resiko yang telah dibuat dapat disimpulkan bahwa terkait hasil analisis resiko strategis pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Resiko Terbatas nya kesempatan kerja memiliki skala resiko sebesar 09 dengan warna oranye yang artinya memiliki kemungkinan kadang-kadang terjadi namun dampak yang dihasilkan sedang akan tetapi resiko yang dimiliki tergolong tinggi.
2. Resiko Akuntabilitas kinerja internal rendah memiliki skala resiko sebesar 09 dengan warna oranye yang artinya memiliki kemungkinan kadang-kadang terjadi namun dampak yang dihasilkan sedang akan tetapi resiko yang dimiliki tergolong tinggi.
3. Resiko Kualitas pelayanan kurang optimal memiliki skala resiko sebesar 09 dengan warna oranye yang artinya memiliki kemungkinan kadang-kadang terjadi namun dampak yang dihasilkan sedang akan tetapi resiko yang dimiliki tergolong tinggi.
4. Resiko Tidak tercapainya target Nilai Manajemen Risiko yang ditetapkan memiliki skala resiko sebesar 09 dengan warna oranye yang artinya memiliki kemungkinan kadang-kadang terjadi namun dampak yang dihasilkan sedang akan tetapi resiko yang dimiliki tergolong tinggi.

Dan terkait gambar hasil analisis resiko operasional pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Resiko Belum semua SDM perusahaan mampu menyusun RTK Mikro memiliki skala resiko sebesar 10 dengan warna oranye yang artinya memiliki kemungkinan kadang-kadang terjadi namun dampak yang dihasilkan sedang akan tetapi resiko yang dimiliki tergolong tinggi.
2. Resiko Belum Semua Lulusan BLK Bersertifikat Kompetensi memiliki skala resiko sebesar 09 dengan warna oranye yang artinya memiliki kemungkinan kadang-kadang terjadi namun dampak yang dihasilkan sedang akan tetapi resiko yang dimiliki tergolong tinggi.

3. Resiko Tidak semua lembaga pelatihan kerja mengikuti akreditasi memiliki skala resiko sebesar 10 dengan warna oranye yang artinya memiliki kemungkinan kadang-kadang terjadi namun dampak yang dihasilkan sedang akan tetapi resiko yang dimiliki tergolong tinggi.
4. Resiko Rendahnya peningkatan produktivitas SDM pada perusahaan kecil pasca konsultasi memiliki skala resiko sebesar 09 dengan warna oranye yang artinya memiliki kemungkinan kadang-kadang terjadi namun dampak yang dihasilkan sedang akan tetapi resiko yang dimiliki tergolong tinggi.
5. Resiko Rendahnya penyerapan tenaga kerja (lulusan SMK) pasca pelaksanaan Job Fair di BKK sebesar 09 dengan warna oranye yang artinya memiliki kemungkinan kadang-kadang terjadi namun dampak yang dihasilkan sedang akan tetapi resiko yang dimiliki tergolong tinggi.
6. Resiko Banyaknya Pekerja Migran Indonesia (PMI) Ilegal memiliki skala resiko sebesar 09 dengan warna oranye yang artinya memiliki kemungkinan kadang-kadang terjadi namun dampak yang dihasilkan sedang akan tetapi resiko yang dimiliki tergolong tinggi.
7. Resiko Rendahnya Kepatuhan Perusahaan memiliki skala resiko sebesar 10 dengan warna oranye yang artinya memiliki kemungkinan kadang-kadang terjadi namun dampak yang dihasilkan sedang akan tetapi resiko yang dimiliki tergolong tinggi.
8. Resiko Pembayaran BPJS terlambat memiliki skala resiko sebesar 09 dengan warna oranye yang artinya memiliki kemungkinan kadang-kadang terjadi namun dampak yang dihasilkan sedang akan tetapi resiko yang dimiliki tergolong tinggi.
9. Resiko Kuota pemberangkatan calon transmigrasi terbatas memiliki skala resiko sebesar 09 dengan warna oranye yang artinya memiliki kemungkinan kadang-kadang terjadi namun dampak yang dihasilkan sedang akan tetapi resiko yang dimiliki tergolong tinggi.
10. Resiko Pelaporan hasil evaluasi kinerja tidak tepat waktu dan kurang maksimal memiliki skala resiko sebesar 09 dengan warna oranye yang artinya memiliki kemungkinan kadang-kadang terjadi

namun dampak yang dihasilkan sedang akan tetapi resiko yang dimiliki tergolong tinggi.

11. Resiko Petugas Akuntansi/Bendahara menyampaikan laporan yang tidak akurat atau melewati batas waktu (deadline) memiliki skala resiko sebesar 10 dengan warna oranye yang artinya memiliki kemungkinan kadang-kadang terjadi namun dampak yang dihasilkan sedang akan tetapi resiko yang dimiliki tergolong tinggi.
12. Resiko Pengaturan pemenang dengan vendor tertentu memiliki skala resiko sebesar 09 dengan warna oranye yang artinya memiliki kemungkinan kadang-kadang terjadi namun dampak yang dihasilkan sedang akan tetapi resiko yang dimiliki tergolong tinggi.

#### **D. PENGENDALIAN YANG SUDAH DILAKUKAN**

Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang dipandang tepat untuk dilakukan dalam rangka mengatasi risiko. Dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian, juga ditetapkan dan dilaksanakan kebijakan serta prosedur, guna memastikan bahwa tindakan yang dilakukan untuk mengatasi risiko telah bekerja secara efektif. Kegiatan yang sudah dilakukan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan untuk mengatasi resiko strategis sebagai berikut :

1. Resiko Terbatas nya kesempatan kerja dengan pengendalian resiko yang sudah ada yakni Melaksanakan Pelatihan berbasis kompetensi untuk meningkatkan Ketrampilan/Kompetensi Angkatan Kerja; Penyebaran info lowongan melalui media sosial; Pengoperasian aplikasi sistem informasi pasar kerja; serta Link and match dengan SMK dalam Bursa Kerja Khusus (BKK).
2. Resiko Akuntabilitas kinerja internal rendah dengan pengendalian resiko yang sudah ada yakni Pemaparan rencana kerja dan anggaran kegiatan masing-masing bidang; Pemaparan realisasi rencana kerja dan anggaran kegiatan masing-masing bidang serta Rapat koordinasi penyusunan Dokumen Perencanaan (Renstra/Renja).
3. Resiko Kualitas pelayanan kurang optimal dengan pengendalian resiko yang sudah ada yakni Maklumat Pelayanan, penyediaan kotak saran, standar operasional prosedur (SOP) pelayanan, dan survei

kepuasan manual.

4. Resiko Tidak tercapainya target Nilai Manajemen Risiko dengan pengendalian resiko yang sudah ada yakni Penyusunan dokumen Risk Register (Daftar Risiko) tahunan dan laporan monitoring triwulanan (aplikasi SIMARIO).

Selain itu kegiatan yang sudah dilakukan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan untuk mengatasi resiko operasional sebagai berikut :

1. Resiko Belum semua SDM perusahaan mampu menyusun RTK Mikro dengan pengendalian resiko yang sudah ada yakni Penyelenggaraan Bimtek/Workshop setahun sekali.
2. Resiko Belum Semua Lulusan BLK Bersertifikat Kompetensi dengan pengendalian resiko yang sudah ada yakni Pelaksanaan pelatihan rutin sesuai kurikulum dan ujian internal BLK, Menyiapkan anggaran untuk alumni BLK mengikuti Uji Kompetensi BNSP.
3. Resiko Tidak semua lembaga pelatihan kerja mengikuti akreditasi dengan pengendalian resiko yang sudah ada yakni Sosialisasi regulasi akreditasi dan Pembinaan kepada lembaga pelatihan kerja.
4. Resiko Rendahnya peningkatan produktivitas SDM pada perusahaan kecil pasca konsultasi dengan pengendalian resiko yang sudah ada yakni Melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis peningkatan produktivitas.
5. Resiko Rendahnya penyerapan tenaga kerja (lulusan SMK) pasca pelaksanaan Job Fair di BKK dengan pengendalian resiko yang sudah ada yakni Melaksanakan koordinasi dengan pengelola BKK SMK dan memfasilitasi pelaksanaan Job Fair secara rutin.
6. Resiko Banyaknya Pekerja Migran Indonesia (PMI) Ilegal dengan pengendalian resiko yang sudah ada yakni Meningkatkan sosialisasi dan pembinaan ke PMI Ilegal serta kerjasama dengan Pemerintah Desa; Koordinasi dengan P3MI untuk kelengkapan persyaratan CPMI serta Penerapan dalam sistem SIAPKerja.
7. Resiko Rendahnya Kepatuhan Perusahaan dengan pengendalian resiko yang sudah ada yakni Sosialisasi regulasi secara berkala

- melalui surat edaran, Pelayanan verifikasi draf peraturan perusahaan.
8. Resiko Pembayaran BPJS terlambat dengan pengendalian resiko yang sudah ada yakni Penganggaran iuran dalam DBHCHT dan Penjadwalan pembayaran iuran rutin.
  9. Resiko Kuota pemberangkatan calon transmigrasi terbatas dengan pengendalian resiko yang sudah ada yakni Pendaftaran calon transmigran secara manual, Koordinasi dengan kementerian transmigrasi terkait pembaruan kuota.
  10. Resiko Pelaporan hasil evaluasi kinerja tidak tepat waktu dan kurang maksimal dengan pengendalian resiko yang sudah ada yakni Peningkat via grup pesan singkat, Melaksanakan evaluasi kinerja tiap tribulan terhadap seluruh pejabat struktural dan melibatkan seluruh pegawai secara berjenjang.
  11. Resiko Petugas Akuntansi/Bendahara menyampaikan laporan yang tidak akurat atau melewati batas waktu (deadline) dengan pengendalian resiko yang sudah ada yakni Rekonsiliasi Internal wajib antara Bendahara Pengeluaran dengan PPTK (terlaksananya rekonsiliasi internal).
  12. Resiko Pengaturan pemenang dengan vendor tertentu dengan pengendalian resiko yang sudah ada yakni Penggunaan aplikasi E-Katalog Konstruksi atau Lelang Elektronik (LPSE).

## **E. PENGENDALIAN YANG MASIH DIBUTUHKAN**

Kegiatan untuk mengendalikan risiko dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu tindakan preventif dan mitigasi. Pengendalian yang bersifat preventif merupakan kegiatan pengendalian yang dibangun untuk mengurangi kemungkinan terjadinya peristiwa risiko. Sedangkan pengendalian yang bersifat mitigasi merupakan kegiatan pengendalian yang dibangun untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan apabila terjadi suatu peristiwa risiko.

Dalam setiap tindakan pengendalian yang telah dilakukan oleh masing-masing unit kerja akan masih ada celah pengendalian yang dapat memberikan dampak buruk bagi pencapaian tujuan suatu organisasi. Sehingga perlu di bangun tindakan pengendalian yang masih dibutuhkan

untuk masing-masing resiko baik resiko stratgeis maupun operasional sebagai berikut :

**Tabel III.7 Rencana Tindak Pengendalian (RTP)**

| No                                              | Risiko Prioritas                      | Kode Risiko          | Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)                                                                                                                                                                                                                                               | Celah Pengendalian                                                                                                                                                          | Rencana Tindak Pengendalian                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Risiko Strategis OPD Dinas Tenaga Kerja:</b> |                                       |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1                                               | Terbatas nya kesempatan kerja         | RSO.26.07.115.0<br>1 | 1. Melaksanakan Pelatihan berbasis kompetensi untuk meningkatkan Ketrampilan/Kompetensi Angkatan Kerja<br>2. Penyebaran info lowongan melalui media sosial<br>3. Pengoperasian aplikasi sistem informasi pasar kerja<br>4. Link and match dengan SMK dalam Bursa Kerja Khusus (BKK) | Perubahan kondisi pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi yang tidak terduga, Kurangnya data real-time mengenai spesifikasi keahlian yang dibutuhkan industri saat ini | Pelatihan berbasis kompetensi (jumlah peserta pelatihan), Koordinasi Daerah Vokasi (terlaksananya koordinasi), Memfasilitasi lulusan sekolah Menengah Kejuruan dan Perguruan tinggi dengan dunia usaha dan dunia industri (Terlaksananya job fair dengan BKK). |
| 2                                               | Akuntabilitas kinerja internal rendah | RSO.26.07.115.0<br>2 | 1).Pemaparan rencana kerja dan anggaran kegiatan masing-masing bidang;2).Pemaparan realisasi rencana kerja dan anggaran kegiatan masing-masing bidang.3) Rapat koordinasi penyusunan Dokumen Perencanaan (Renstra/Renja),                                                           | Pelaksanaan rapat tribulan belum terlaksana secara konsisten dan tindak lanjut hasil evaluasi sering terlambat                                                              | Melaksanakan evaluasi kinerja tiap tribulan terhadap seluruh pejabat struktural dan melibatkan seluruh pegawai secara berjenjang (Tersedianya Laporan evaluasi Kinerja Tribulan)                                                                               |

| No                                                | Risiko Prioritas                                                 | Kode Risiko          | Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)                                                                                 | Celah Pengendalian                                                                                                                                                                            | Rencana Tindak Pengendalian                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3                                                 | Kualitas pelayanan kurang optimal                                | RSO.26.07.115.0<br>3 | Maklumat Pelayanan, penyediaan kotak saran, standar operasional prosedur (SOP) pelayanan, dan survei kepuasan manual. | Survei tahunan seringkali tidak menggambarkan kondisi real-time; kotak saran jarang diisi, Pengolahan data lambat dan seringkali responden mengisi secara tidak objektif karena terburu-buru. | Digitalisasi Survei Kepuasan Masyarakat berbasis QR Code (Tersedianya stiker/standing banner QR Code di setiap loket)                                                              |
| 4                                                 | Tidak tercapainya target Nilai Manajemen Risiko yang ditetapkan  | RSO.26.07.115.0<br>4 | Penyusunan dokumen Risk Register (Daftar Risiko) tahunan dan laporan monitoring triwulanan (aplikasi SIMARIO)         | Monitoring Risiko seringkali hanya dianggap beban administrasi                                                                                                                                | Sosialisasi budaya risiko bagi seluruh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) ( Terlaksananya sosialisasi), Implementasi Monitoring Evaluasi RTP (Dokumen Laporan Realisasi RTP) |
| <b>Risiko Operasional OPD Dinas Tenaga Kerja:</b> |                                                                  |                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                    |
| 1                                                 | Operasional: Belum semua SDM perusahaan mampu menyusun RTK Mikro | ROO.26.07.115.0<br>1 | Penyelenggaraan Bimtek/Workshop setahun sekali                                                                        | Bimtek tidak berkelanjutan (hanya sekali jalan) tanpa pendampingan pasca-pelatihan                                                                                                            | Layanan asistensi bagi perusahaan (Terlaksananya sesi asistensi bagi 25 SDM/tahun)                                                                                                 |

| No | Risiko Prioritas                                                                             | Kode Risiko          | Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)                                                                                                   | Celah Pengendalian                                                                                                                                                                                                | Rencana Tindak Pengendalian                                                                                                                                                                                                         |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2  | Risiko Operasional:<br>Belum Semua Lulusan BLK Bersertifikat Kompetensi                      | ROO.26.07.115.0<br>2 | Pelaksanaan pelatihan rutin sesuai kurikulum dan ujian internal BLK, Menyiapkan anggaran untuk alumni BLK mengikuti Uji Kompetensi BNSP | Belum ada kewajiban sertifikasi BNSP bagi seluruh peserta di akhir program (Masih minimnya alokasi anggaran untuk UJK, perlu penambahan anggaran) dan kurangnya link and match dengan kebutuhan industri terkini. | Menambahkan tahap asesmen awal (pre-test) untuk menilai kesiapan peserta (terlaksananya pre-test) dan Integrasi Program Pelatihan & Sertifikasi (Terbitnya Sertifikat Kompetensi BNSP bagi peserta yang dinyatakan lulus pelatihan) |
| 3  | Kemitraan: Tidak semua lembaga pelatihan kerja mengikuti akreditasi                          | ROO.26.07.115.0<br>3 | Sosialisasi regulasi akreditasi dan Pembinaan kepada lembaga pelatihan kerja                                                            | Sosialisasi hanya bersifat administratif, Terkendala minimnya anggaran                                                                                                                                            | Melakukan bimbingan dan pendampingan terkait pentingnya akreditasi lembaga (Jumlah LPK Swasta terakreditasi bertambah)                                                                                                              |
| 4  | Operasional: Rendahnya peningkatan produktivitas SDM pada perusahaan kecil pasca konsultasi. | ROO.26.07.115.0<br>4 | Melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis peningkatan produktivitas                                                                 | Monitoring pasca-konsultasi belum dilakukan secara berkelanjutan, sehingga sulit memastikan metode produktivitas diterapkan secara konsisten                                                                      | Pembentukan grup konsultasi berkelanjutan (mentoring digital) (Tersedianya Dokumen Laporan Monitoring Pasca-Konsultasi)                                                                                                             |

| No | Risiko Prioritas                                                                                  | Kode Risiko          | Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)                                                                                                                                                           | Celah Pengendalian                                                                                                                          | Rencana Tindak Pengendalian                                                                                                                                                              |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5  | Operasional:<br>Rendahnya penyerapan tenaga kerja (lulusan SMK) pasca pelaksanaan Job Fair di BKK | ROO.26.07.115.0<br>5 | Melaksanakan koordinasi dengan pengelola BKK SMK dan memfasilitasi pelaksanaan Job Fair secara rutin                                                                                            | Belum ada pemetaan kompetensi siswa sebelum Job Fair dan monitoring pasca-acara (apakah pelamar benar-benar dipanggil/diterima) masih lemah | Pelaporan hasil seleksi dari perusahaan kepada BKK dalam jangka waktu tertentu (Tersedianya database hasil penempatan tenaga kerja per masing-masing SMK yang menyelenggarakan Job Fair) |
| 6  | Kemitraan:<br>Banyaknya Pekerja Migran Indonesia (PMI) Ilegal                                     | ROO.26.07.115.0<br>6 | 1. Meningkatkan sosialisasi dan pembinaan ke PMI Ilegal serta kerjasama dengan Pemerintah Desa 2. Koordinasi dengan P3MI untuk kelengkapan persyaratan CPMI 3. Penerapan dalam sistem SIAPKerja | Jangkauan sosialisasi belum merata, Banyak calo CPMI yang menjanjikan dan gaji tinggi                                                       | 1. Koordinasi Pemdes, BP2MI dan Aparatur untuk pencegahan PMI Ilegal (Terlaksananya koordinasi) 2. Koordinasi dg Direktorat PTKLN (Terlaksananya koordinasi)                             |
| 7  | Risiko Kemitraan:<br>Rendahnya Kepatuhan Perusahaan                                               | ROO.26.07.115.0<br>7 | Sosialisasi regulasi secara berkala melalui surat edaran, Pelayanan verifikasi draf peraturan perusahaan                                                                                        | Sosialisasi pasif (surat) sering tidak dibaca atau tidak sampai ke pembuat kebijakan di perusahaan                                          | Jemput bola dan penyediaan layanan konsultasi penyusunan PP/PKB (jumlah SK Pengesahan PP dan Nomor Pendaftaran PKB yang diterbitkan)                                                     |

| No | Risiko Prioritas                                                                            | Kode Risiko      | Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)                                                                                                                              | Celah Pengendalian                                                                                                                                    | Rencana Tindak Pengendalian                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8  | Risiko Kemitraan : Pembayaran BPJS terlambat                                                | ROO.26.07.115.08 | Penganggaran iuran dalam DBHCHT dan Penjadwalan pembayaran iuran rutin                                                                                             | Data nelayan dan petani sangat dinamis (pindah profesi/meninggal) sehingga validasi sering melampaui batas tanggal tagihan (invoice) BPJS             | Koordinasi percepatan DBHCHT                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 9  | Kemitraan : Kuota pemberangkatan calon transmigrasi terbatas                                | ROO.26.07.115.09 | Pendaftaran calon transmigran secara manual, Koordinasi dengan kementerian transmigrasi terkait pembaruan kuota                                                    | Informasi kuota sering terlambat diterima daerah, Belum ada kriteria prioritas yang transparan                                                        | Koordinasi intensif dengan Kementerian terkait penambahan kuota khusus daerah (Surat usulan penambahan kuota dan berita acara koordinasi)                                                                                                                                         |
| 10 | Risiko Operasional : Pelaporan hasil evaluasi kinerja tidak tepat waktu dan kurang maksimal | ROO.26.07.115.10 | Peningkat via grup pesan singkat, Melaksanakan evaluasi kinerja tiap tribulan terhadap seluruh pejabat struktural dan melibatkan seluruh pegawai secara berjenjang | Belum adanya sanksi tegas bagi keterlambatan input, Pelaksanaan rapat tribulan belum terlaksana secara konsisten dan belum melibatkan seluruh pegawai | Melakukan koordinasi dan kerja sama kepada pihak - pihak terkait mengenai data yang dibutuhkan dan mempertimbangkan hasil evaluasi kinerja periode sebelumnya (Tersedianya dokumen hasil koordinasi data dan laporan evaluasi kinerja yang mempertimbangkan progres periode lalu) |

| No | Risiko Prioritas                                                                                                        | Kode Risiko          | Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)                                                                      | Celah Pengendalian                                                                      | Rencana Tindak Pengendalian                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11 | Operasional:<br>Petugas Akuntansi/Bendahara menyampaikan laporan yang tidak akurat atau melewati batas waktu (deadline) | ROO.26.07.115.1<br>1 | Rekonsiliasi Internal wajib antara Bendahara Pengeluaran dengan PPTK (terlaksananya rekonsiliasi internal) | Belum ada sistem kendali (checklist) digital yang memantau kelengkapan berkas           | Menetapkan deadline internal (misal: tanggal 5 setiap bulan) sebelum batas waktu resmi untuk memberikan ruang koreksi. Mewajibkan koordinasi antara bagian aset, bagian program, dan bendahara setiap bulan sebelum laporan final dicetak (Tersedianya Berita Acara Rekonsiliasi Internal dan Lembar Kendali Dokumen) |
| 12 | Fraud: Pengaturan pemenang dengan vendor tertentu                                                                       | ROO.26.07.115.1<br>2 | Penggunaan aplikasi E-Katalog Konstruksi atau Lelang Elektronik (LPSE).                                    | Lemahnya pengawasan dalam tindakan gratifikasi dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa | Menggencarkan sosialisasi mengenai pemahaman terhadap anti korupsi dan gratifikasi (terlaksana sosialisasi) serta Review Spesifikasi oleh Tim (Berita Acara Review Spesifikasi Teknis)                                                                                                                                |

#### **IV. RANCANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI**

Informasi adalah data yang telah diolah dan dijadikan dasar pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi. Komunikasi adalah proses penyampaian informasi dengan menggunakan media tertentu, baik langsung maupun tidak langsung, untuk mendapatkan umpan balik yang konstruktif.

Guna mendukung berjalanya lingkungan pengendalian yang dibangun, maka diperlukan media untuk menyampaikan masing-masing unsur lingkungan pengendalian. Media penyampaian informasi yang dilakukan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan sebagai berikut :

**Tabel III.8 Infokom Resiko Strategis**

| No                                              | Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan                                                                                                                                                                                                                         | Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian                                                                            | Penyedia Informasi                 | Penerima Informasi                                           |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Risiko Strategis OPD Dinas Tenaga Kerja:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                 |                                    |                                                              |
| 1                                               | Pelatihan berbasis kompetensi (jumlah peserta pelatihan), Koordinasi Daerah Vokasi (terlaksananya koordinasi), Memfasilitasi lulusan sekolah Menengah Kejuruan dan Perguruan tinggi dengan dunia usaha dan dunia industri (Terlaksananya job fair dengan BKK) | Rapat Internal, Rapat koordinasi lintas sektor (LKS Tripartit, OPD Terkait, tim TKDV), Media Massa, Job Fair    | Dinas Tenaga Kerja                 | Internal dan Eksternal                                       |
| 2                                               | Melaksanakan evaluasi kinerja tiap tribulan terhadap seluruh pejabat struktural dan melibatkan seluruh pegawai secara berjenjang (Tersedianya Laporan evaluasi Kinerja Tribulan)                                                                              | 1). Rapat koordinasi;2). Laporan hasil realisasi kinerja                                                        | Sekretariat                        | Internal                                                     |
| 3                                               | Maklumat Pelayanan, penyediaan kotak saran, standar operasional prosedur (SOP) pelayanan, dan survei kepuasan manual.                                                                                                                                         | Briefing petugas loket, Penempelan QR Code survei kepuasan instansi di loket, dan akun media sosial resmi Dinas | Sekretariat                        | Petugas Front Office dan Masyarakat Pengguna Layanan         |
| 4                                               | Penyusunan dokumen Risk Register (Daftar Risiko) tahunan dan laporan monitoring triwulanan (aplikasi SIMARIO)                                                                                                                                                 | Grup Koordinasi Digital (WhatsApp), Dashboard SIMARIO                                                           | Sekretaris, Admin Manajemen Risiko | Seluruh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pelaksana Program |

**Tabel III.9 Infokom Resiko Operasional**

| No                                                | Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan                                                                                                   | Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian                                                    | Penyedia Informasi                                                             | Penerima Informasi                       |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Risiko Operasional OPD Dinas Tenaga Kerja:</b> |                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                |                                          |
| 1                                                 | Penyelenggaraan Bimtek/Workshop setahun sekali                                                                                          | Group WhatsApp                                                                          | Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, Pengantar Kerja | SDM perusahaan                           |
| 2                                                 | Pelaksanaan pelatihan rutin sesuai kurikulum dan ujian internal BLK, Menyiapkan anggaran untuk alumni BLK mengikuti Uji Kompetensi BNSP | Brosur Program Pelatihan, dan Rapat Koordinasi dengan LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi) | Bidang Pelatihan Kerja                                                         | Calon Peserta Pelatihan & LSP            |
| 3                                                 | Sosialisasi regulasi akreditasi dan Pembinaan kepada lembaga pelatihan kerja                                                            | Forum Komunikasi LPKS                                                                   | Bidang Pelatihan Kerja                                                         | Lembaga Pelatihan Kerja Swasta           |
| 4                                                 | Melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis peningkatan produktivitas                                                                 | Kunjungan Monitoring (Monev), WhatsApp Group                                            | Bidang Informasi Pasar Kerja dan Peningkatan Produktivitas                     | Pemilik dan Manajer SDM Perusahaan Kecil |

| No | Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan                                                                                                                                                           | Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian                                                   | Penyedia Informasi                                            | Penerima Informasi                                |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 5  | Melaksanakan koordinasi dengan pengelola BKK SMK dan memfasilitasi pelaksanaan Job Fair secara rutin                                                                                            | Rapat Koordinasi Forum BKK SMK dan Aplikasi Informasi Pasar Kerja                      | Bidang Informasi Pasar Kerja dan Peningkatan Produktivitas    | Pengelola BKK SMK dan Divisi HRD Perusahaan Mitra |
| 6  | 1. Meningkatkan sosialisasi dan pembinaan ke PMI Ilegal serta kerjasama dengan Pemerintah Desa 2. Koordinasi dengan P3MI untuk kelengkapan persyaratan CPMI 3. Penerapan dalam sistem SIAPKerja | Koordinasi Tatap Muka & Surat ResmI, Sosialisasi Tatap Muka (Rakor Pemdes), dan Medsos | Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Calon PMI                                         |
| 7  | Sosialisasi regulasi secara berkala melalui surat edaran, Pelayanan verifikasi draf peraturan perusahaan                                                                                        | Sosialisasi tatap muka, grup koordinasi HRD, Website resmi Disnaker                    | Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja    | Pimpinan Perusahaan & HRD                         |
| 8  | Penganggaran iuran dalam DBHCHT dan Penjadwalan pembayaran iuran rutin                                                                                                                          | Grup Koordinasi & Surat Resmi                                                          | Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja    | BPJS Ketenagakerjaan                              |

| No | Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan                                                                                                                             | Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian                | Penyedia Informasi                                            | Penerima Informasi                             |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 9  | Pendaftaran calon transmigran secara manual, Koordinasi dengan kementerian transmigrasi terkait pembaruan kuota                                                   | Koordinasi Tatap Muka & Surat Resmi                 | Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Kementerian                                    |
| 10 | Peringat via grup pesan singkat, Melaksanakan evaluasi kinerja tiap tribulan terhadap seluruh pejabat struktural dan melibatkan seluruh pegawai secara berjenjang | Rapat Koordinasi Teknis, Nota Dinas Permintaan Data | Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi                           | Seluruh Kepala Bidang dan PPTK                 |
| 11 | Rekonsiliasi Internal wajib antara Bendahara Pengeluaran dengan PPTK (terlaksananya rekonsiliasi internal)                                                        | Rapat Koordinasi & Nota Dinas                       | Sub Bagian Keuangan                                           | Seluruh PPTK                                   |
| 12 | Penggunaan aplikasi E-Katalog Konstruksi atau Lelang Elektronik (LPSE).                                                                                           | Rapat Koordinasi dan Banner Anti-Gratifikasi        | Bagian Umum dan Kepegawaian                                   | Penyedia Jasa (Vendor) dan Tim Teknis Lapangan |

Dalam rangka pelaksanaan manajemen resiko informasi dan komunikasi penting untuk dilakukan agar dapat mengintegrasikan pelaksanaan komponen pengendalian yang telah di susun secara efektif. Terutama dalam hal terkait langsung dengan pencapaian tujuan organisasi agar dapat berjalan dengan baik sesuai dengan yang di inginkan.

## **V. RANCANGAN PEMANTAUAN**

Pemantauan dan evaluasi atas pengendalian intern pada dasarnya ditujukan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang diterapkan, telah berjalan secara efektif mengatasi resiko dan apakah langkah-langkah perbaikan telah dilaksanakan. Pemantauan berkelanjutan yang perlu dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan meliputi Redesain kurikulum pelatihan agar selalu relevan dengan kebutuhan industri yang berkembang (Upskilling/Reskilling), dan Penyusunan usulan penambahan anggaran UJK pada tahun berikutnya.

## VI. PENUTUP

Pelaporan manajemen risiko ini dilakukan sebagai wujud proses atas tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan atas tercapainya tujuan yang telah ditetapkan organisasi. Dokumen ini menjadi instrumen untuk merencanakan sekaligus memantau capaian perbaikan atau pembangunan infrastruktur pengendalian intern agar berjalan efektif dan efisien dalam mencapai tujuan/sasaran.

Dari hasil rencana kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang akan dilaksanakan dapat disimpulkan bahwa peranan unit pengendali risiko sangat penting dalam pengelolaan risiko, dimulai dari identifikasi risiko, pelaksanaan kegiatan, penyusunan rencana tindak pengendalian dan pemantauan.

Sebagai tindak lanjut dari monitoring pengelolaan risiko pada periode tahun lalu sebagai perbaikan untuk penerapan pengelolaan risiko periode tahun ini guna meningkatkan kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan, kemudian akan dilakukan evaluasi dan reviu terhadap rencana tindak pengendalian secara terpadu.

Lamongan,       Maret 2026

KEPALA DINAS TENAGA KERJA  
KABUPATEN LAMONGAN



*M. Zamroni*  
**M. ZAMRONI, S.Sos. M.Si.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19730707 199303 1 010